



Warta Bisnis

BPK RI Gelar Dialog Terbuka

■ Pemantapan, Pemahaman, Pengelolaan Dana Desa

BADAN Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menggelar dialog terbuka, membahas tentang pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa, di Pontianak Convention Canter (PCC) Pontianak, Kamis (13/10) pukul 09.00 WIB.

Dengan jumlah peserta dialog terbuka, sekitar 500 orang terdiri dari Pendamping Desa dan Kepala Desa yang mewakili 14 kabupaten kota di Provinsi Kalbar. Hadir Anggota VI BPK RI Prof Dr Bahrullah Priyanto, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio, Anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno, Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie, Ketua DPRD Kalbar M Kebing L, dan para undangan lainnya.

Dalam kata sambutan Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio mengucapkan, terimakasih kepada peserta dialog dan para undangan telah hadir dalam acara dialog terbuka ini. Dengan tujuan bagaimana mengelola dana desa dengan baik. Sehingga laporan keuangan berkualitas.

"Saya harap kepada peserta dialog terbuka yaitu, pendam-



BAHAS - Dialog terbuka yang digelar BPK RI Kalbar membahas pemantapan pengelolaan dana desa, di PCC Pontianak, Kamis (13/10).

TRIBUN/RUL

ping desa dan kepala desa se Kalbar, agar dengan serius mengikuti kegiatan ini. Sehingga laporan keuangan betul-betul berkualitas," ungkapnya dengan singkat dihadapan peserta dialog terbuka tersebut.

Anggota VI BPK RI Prof Dr Bahrullah Priyanto menyatakan, BPK tidak hanya memeriksa keuangan, tapi terus mendorong bekerja. "BPK jangan ditakuti, kita satu sinergi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan," ujarnya.

Bahrullah Priyanto meminta, supaya pemerintah daerah di Kalbar harus menyiapkan per-

aturan baru tentang pengelolaan anggaran dengan baik. Serta melakukan sosialisasi. "Dalam bagaimana mengelola keuangan dengan baik, kita harus bekerjasama, yaitu tujuan sama untuk meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas," ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno mengimbau, kepala desa jangan takut menggunakan dana desa. Karena untuk kepentingan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. "Kita kerja karena, sesuai dengan visi misi nawacita Presiden dan Wakil Presiden Joko-JK," ungkapnya. **(rul)**